

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERKOTAAN DI KELURAHAN LAWANGIRUNG KECAMATAN WENANG¹

Oleh :
Marianne Voges², F. Kerebungu³, Lucia C. Mandey⁴

ABSTRAK

Memberdayakan masyarakat mengandung arti mengembangkan, memandirikan, dan memperkuat posisi masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekanan di segala bidang dan sektor kehidupan. Di samping itu juga mengandung arti melindungi dan membela dengan berpihak pada yang lemah untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas masyarakat lemah.

Pengembangan merupakan upaya mendorong terjadinya perubahan sosial yang sistematis, terencana, dan terkontrol. Perencanaan dan pengawasan yang teratur menjadi cara pendekatan untuk menggerakkan masyarakat agar terjadinya perubahan kearah perbaikan taraf hidupnya. Perubahan sosial tersebut meliputi segi kehidupan yang intrinsik dan ekstrinsik. Nilai sosial dan budaya sebagai intrinsik benar-benar dijunjung tinggi dan dihormati sedang hal-hal baru sebagai hal yang ekstrinsik perlu disaring dan diserap untuk memperkaya pengetahuan dan wawasan. Hal tersebut berguna atau bermanfaat bagi kehidupan yang menjunjung tinggi harkat sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian pemberdayaan dapat dilihat sebagai proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan yang memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat. Sebagai tujuan pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat menjadi berdaya, mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup, memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan mandiri dalam melaksanakan kehidupan. Berdasarkan beberapa hal diatas dapat dimaknai bahwa setelah munculnya kesadaran atau potensi dan kemampuan untuk meningkatkan derajat maka tumbuhlah semangat untuk melakukan perubahan ini adalah sebuah proses sekaligus sebuah tujuan.

Kata kunci : Pemberdayaan, Partisipasi dan Mandiri

PENDAHULUAN

Persoalan kemiskinan sering dipahami sebagai suatu persoalan yang bersifat kompleks, multi dimensi, dan struktural sehingga penanganannya memerlukan pendekatan yang komprehensif. Pembelajaran pengalaman selama ini mengedepankan kemandirian dan gerakan kolektif antar masyarakat, pemerintah maupun berbagai pihak terkait lainnya di daerah sebagai salah satu kunci penanggulangan kemiskinan.

Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral dan santunan dalam kenyataannya sering justru menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih-benih fragmentasi sosial yang melemahkan modal sosial yang ada di

¹ Merupakan tesis penulis

² Mahasiswa Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi

³ Selaku Pembimbing 1

⁴ Selaku Pembimbing 2

masyarakat (gotong royong, kepedulian dan lain-lain). Lemahnya modal sosial pada gilirannya juga mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalan secara bersama. Kondisi modal sosial masyarakat yang melemah serta memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan dari pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat yang selama ini cenderung tidak adil dan tidak transparan. Akibatnya menimbulkan kecurigaan, ketidakpedulian dan skeptisme di masyarakat.

Untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja, pemerintah telah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri mulai tahun 2007, sebagai kelanjutan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah dilaksanakan sejak tahun 1999. Melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri, upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh berbagai pihak diharapkan dapat dilaksanakan secara bersinergi dan lebih terarah pada kelompok masyarakat miskin dan wilayah tertinggal. Program ini berupaya menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan yang *representatif*, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang, yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat (Departemen Pekerjaan Umum, 2012).

Salah satu agenda penting di tingkat masyarakat terkait pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perkotaan adalah kegiatan pengembangan kapasitas individu masyarakat, pada tataran pelaksanaan di masyarakat kegiatan pengembangan kapasitas tersebut meliputi proses pelaksanaan di tataran masyarakat yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan kegiatan hingga pemantauan dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut harus berjalan terus dan berkesinambungan karena yang diharapkan dari pemberdayaan adalah pembiasaan masyarakat dalam pembangunan yang partisipatif dan peran serta masyarakat dapat menjadi budaya dalam kehidupan sehari-harinya. Melalui proses partisipatif, pembentukan kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat terutama masyarakat miskin agar dapat diberdayakan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan subyek penanggulangan kemiskinan.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat secara nyata dan terarah. Mereka tidak akan dijadikan obyek dalam pembangunan tetapi mereka sendiri akan menjadi perencana dan evaluator dari perencanaan pembangunan itu sendiri. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program-program yang dilaksanakan di daerahnya dan kesejahteraan masyarakat di masing-masing daerah, (Adisasmita, 2006).

Pada masa krisis ekonomi tahun 1998/1999, program pemberdayaan masyarakat semakin digalakkan dengan diluncurkannya beberapa program kegiatan pemberdayaan. Pada tahun 2007 Pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri sebagai salah satu kebijakan nasional penanggulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksudkan untuk memperbaiki stabilitas sosial, membuka lapangan kerja, memperbaiki *local governance* dan menciptakan aset untuk kelompok miskin. Kelompok masyarakat yang terbentuk dimaksudkan untuk menghilangkan marginalitas penduduk miskin dan menjadi model jaringan pengaman sosial.

Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan meletakkan sasaran utamanya kepada BKM yang didalamnya merupakan masyarakat tergolong kalangan ekonomi lemah untuk ditumbuhkan kemandiriannya. Sehingga bukan masyarakat miskin secara perorangan yang akan diberdayakan melainkan sejumlah orang dalam masyarakat yang tergabung dalam suatu wadah BKM yang dikenai tindakan (*treatment*). Program-program yang menjadi kegiatan utama dari PNPM Mandiri Perkotaan berupa membangun sarana prasarana fasilitas

penunjang yang menjadi prioritas kebutuhan masyarakat sekitar dan suntikan dana yang disebut dengan dana bergulir yang diperuntukkan khusus bagi mereka yang mempunyai usaha sangat baik karena bertujuan memberikan bantuan untuk menjadikan kelurahan yang disentuh oleh PNPM Mandiri Perkotaan menjadi kelurahan yang mapan dan mandiri, (Soetomo, 2012).

Kelurahan Lawangirung adalah salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Wenang dengan luas wilayah sebesar 25,6 ha/m² juga mendapat bantuan program PNPM Mandiri Perkotaan. Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang terdiri dari 6 (enam) lingkungan dengan jumlah penduduk berdasarkan data dari kantor Lurah Lawangirung berjumlah 3.139 jiwa dan 880 KK.

Dari data kependudukan Kelurahan Lawangirung tahun 2015, secara keseluruhan keluarga yang dikategorikan miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Manado adalah yang selama ini mendapat bantuan terdiri dari : jumlah penerima Raskin (Beras Miskin) 61 Kepala Keluarga dan jumlah peserta Askeskin/jamkesmas sebanyak 244 orang. Kondisi masyarakat ini membuat masyarakat tidak mampu dan tak berdaya untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

Penulis melihat bahwa mulai dari tahap perencanaan, tahap pelaksanaan kegiatan, tahap evaluasi sampai pada tahap pemeliharaan program kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Banyak anggota masyarakat, kelompok maupun individu menilai bahwa program yang dikembangkan tidak dapat menjawab kebutuhan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberdayaan (*empowerment*), berasal dari kata "power" (kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dengan kemampuan kita untuk membuat orang lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka.

Menurut Suharto (2010) pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam :

- a) Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan
- b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan
- c) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka

Dalam buku Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat (Fahrudin, 1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berasal dari penerjemahan bahasa Inggris "*empowerment*". Secara harafiah *empowerment* berarti "pemberian kekuasaan" atau "pemberian kekuatan". Selanjutnya dalam buku *Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi* (Ife J, 2008) mengatakan *empowerment aims to increase the power of disadvantaged* (pemberdayaan bertujuan memberikan kekuatan atau kekuasaan kepada orang-orang yang tidak beruntung). Sedangkan Swift dan Levin cenderung mengartikan *empowerment* sebagai pengalokasian ulang mengenai kekuasaan (*reallocation of power*). Rappaport (1984) mengartikan *empowerment* sebagai suatu cara dimana rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar dapat berkuasa atas kehidupannya.

Suharto (2010) juga mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada :

- a) Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertumbuhan individual yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b) Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dan orang lain.

- c) Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial yang dimulai dari pendidikan dan politisasi orang-orang lemah dan kemudian melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur-struktur yang masih menekan.

Berbeda dengan pendapat diatas, Sumodiningrat (2000) menyampaikan pemberdayaan sebenarnya merupakan istilah yang khas Indonesia daripada Barat. Menurutnya istilah *empowerment* itu benar tetapi tidak tepat. Pemberdayaan yang kita maksud adalah memberi "daya" bukanlah "kekuasaan". *Empowerment* dalam khasana barat lebih bernuansa "pemberian kekuasaan" daripada "pemberdayaan" itu sendiri. Beliau juga mengingatkan kita untuk memahami *empowerment* antara konteks Barat dengan konteks Indonesia hendaknya berbeda mengingat perbedaan latar belakang sosial, budaya, politik dan lingkungan. Tujuannya agar dalam aplikasi konsep pemberdayaan ke dalam bentuk pendekatan teknis tidak mengalami hambatan dan sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni dalam Sulistiyani (2004) mengungkapkan bahwa *inti dari pemberdayaan* adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*) dan terciptanya kemandirian. Bertolak dari pendapat ini berarti pemberdayaan tidak saja terjadi pada masyarakat yang tidak memiliki kemampuan akan tetapi pada masyarakat yang memiliki daya yang masih terbatas, dapat dikembangkan hingga mencapai kemandirian.

Hikmat (2010) dalam bukunya yang berjudul Strategi Pemberdayaan Masyarakat mengatakan bahwa konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selalu dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasai jaringan kerja dan keadilan. Beliau juga mengatakan bahwa pada dasarnya pemberdayaan diletakkan pada kekuatan individu dan sosial.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dalam konsep pemberdayaan, manusia adalah subjek dari dirinya sendiri. Proses pemberdayaan menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya.

Sejalan dengan itu Moebyarto (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber hidup yang penting. Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi antara lapisan sosial sehingga kemampuan individu "senasib" untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif, (Fahrudin,1996).

Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi rakyat tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai dan budaya setempat. Pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi tetapi juga nilai tambah sosial budaya.

Dengan demikian keberhasilan dari pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari masyarakat menjadi dinamis dan aktif berpartisipasi didalam membangun diri mereka. Tidak menggantungkan hidupnya kepada belas kasihan orang lain. Masyarakat berdaya memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupan baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan inspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dari beberapa pendapat pakar pekerjaan sosial (Fahrudin, 1996) di antaranya : Solomon, Swift & Levin, Kieffer, Rappaport dan DuBois dan Miley maka dapat disimpulkan beberapa prinsip dan asumsi pemberdayaan yaitu antara lain :

- a) *Empowerment* adalah proses kolaboratif, dimana klien dan pekerja sosial bekerjasama sebagai partner.
- b) Proses *empowerment* melihat sistem klien sebagai pemegang peranan penting (*competent*) dan mampu memberikan akses kepada sumber-sumber dan peluang-peluang.
- c) Klien harus menerima sisi mereka sendiri sebagai *causal agent* yang mampu untuk mempengaruhi perubahan.
- d) Kompetensi diperoleh melalui pengalaman hidup.
- e) Pemecahan masalah didasarkan pada situasi masalah yang merupakan hasil dari kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhinya
- f) Jaringan sosial informal adalah sumber pendukung yang penting untuk menjembatani tekanan dan membangun kompetensi dan kontrol diri.
- g) Orang harus berpartisipasi dalam pemberdayaan diri mereka dan dalam mencapai tujuan, pengertian dan hasil dari pemberdayaan harus mereka aktualisasikan sendiri.
- h) Tingkat kesadaran dan pengetahuan mengenai kegiatan untuk melakukan perubahan merupakan masalah utama dalam *empowerment*.
- i) *Empowerment* merupakan upaya untuk memperoleh sumber-sumber dan kemampuan menggunakan sumber-sumber tersebut dengan cara yang efektif.
- j) Proses *empowerment* adalah proses yang dinamis, sinergi selalu berubah dan berevolusi karena masalah-masalah selalu mempunyai banyak cara pemecahan.
- k) *Empowerment* dapat dicapai melalui kesepadanan struktur-struktur pribadi dan perkembangan sosio-ekonomi.

B. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat sering kali dianggap sebagai bagian yang tidak terlepas dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Dalam kerangka pembangunan berkelanjutan maka menjadi suatu kebutuhan adanya perencanaan partisipatif dalam pembangunan. Hal ini dapat meningkatkan manfaat yang akan diterima masyarakat dari proses pembangunan yang dilaksanakan. Dalam pembangunan seperti itu sangat dibutuhkan keterlibatan masyarakat. Tanpa partisipasi dari seluruh masyarakat maka pembangunan sulit dapat berjalan dengan baik.

Selanjutnya dalam buku Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat (Fahrudin, 1996) kita bisa melihat pendapat dari beberapa tokoh sosial mengenai partisipasi. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang secara sukarela tanpa dipaksa sebagaimana yang dijelaskan oleh Sastropetro bahwa partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan.

Partisipasi adalah kesadaran untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tidak beda jauh dengan pendapat tersebut, Sumardjo & Saharudin mengatakan bahwa partisipasi menyangkut keterlibatan masyarakat secara aktif dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan, evaluasi dan menikmati hasilnya suatu usaha perubahan masyarakat yang direncanakan untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat, (Fahrudin, 1996).

Menurut Ndraha (1999) partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat dipilah sebagai berikut :

- a) Partisipasi dalam/melalui kontak dengan pihak lain sebagai awal perubahan sosial
- b) Partisipasi dalam memperhatikan/menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi, baik dalam arti menerima, menerima dengan syarat maupun dalam arti menolaknya
- c) Partisipasi dalam perencanaan termasuk pengambilan keputusan
- d) Partisipasi dalam pelaksanaan operasional

- e) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan yaitu keterlibatan masyarakat dalam menilai tingkat pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan tingkatan hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

C. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)-Mandiri

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu kebijakan bantuan sosial yang sangat strategis dalam rangka mengurangi jumlah penduduk miskin, meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan fasilitas pelayanan dasar, meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendorong percepatan pembangunan di daerah. Berbagai Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, unsur masyarakat, maupun kalangan dunia usaha secara terpadu terlibat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya bagi masyarakat miskin (Subardi, 2012).

Menurut Rahayu (2012) Pemberdayaan masyarakat menjadi program nasional yang dikenal dengan PNPM-Mandiri secara resmi ditetapkan dalam tahun 2007 yaitu mengadopsi dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK) menjadi PNPM-Perdesaan yang diluncurkan pada era krisis sebagai dasar pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan beserta salah satu program pendukungnya yaitu Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) atau dikenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sebagai dasar program nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menanggulangi persoalan kemiskinan yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat yang tinggal di wilayah perkotaan.

Subardi (2012) menyatakan bahwa sesuai dengan lokasi kegiatannya PNPM-Mandiri dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu PNPM-Mandiri Perkotaan dan PNPM Pedesaan (PNPM-Pedesaan, PPIP, PISEW, P2DTK).

Tujuan dari PNPM-Mandiri terdiri dari :

- a) Tujuan umum yaitu meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri;
- b) Tujuan khusus, yaitu terdiri dari :
 1. Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil, dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan;
 2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel;
 3. Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*);
 4. Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat, dan kelompok peduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan;
 5. Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya;
 6. Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi social dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal;
 7. Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi, dan komunikasi, dalam pemberdayaan masyarakat.

D. Konsep Kemiskinan

Menurut Bappenas (2005), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak- hak dasar tersebut antara lain :

1. Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan
3. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan hidup bermartabat. Hak- hak dasar tersebut tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lainnya.

Pendapat Sulistiyani (2004) tentang konsep kemiskinan yaitu kemiskinan bersifat multidimensional. Oleh karena itu cara pandang yang dipergunakan untuk memecahkan persoalan kemiskinan hendaknya juga meliputi beberapa aspek dari kemiskinan. Dilihat dari sisi *poverty profile* masyarakat, kemiskinan tidak hanya menyangkut persoalan kesejahteraan (*welfare*) semata tetapi kemiskinan menyangkut persoalan kerentanan (*vulnerability*), ketidakberdayaan (*powerless*), tertutupnya akses kepada pelbagai peluang kerja, menghabiskan sebagian besar penghasilannya untuk kebutuhan konsumsi, angka ketergantungan yang tinggi, rendahnya akses terhadap pasar dan kemiskinan terefleksi dalam budaya kemiskinan yang diwaris dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Menurut Suharto (2010) bahwa kemiskinan memiliki beberapa ciri, yaitu :

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, dan papan)
2. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi)
3. Ketiadaan jaminan Masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga)
4. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual maupun massal
5. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam
6. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial
7. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Ketidakmampuan berusaha karena cacat fisik maupun mental
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan (anak terlantar, wanita korban KDRT, janda miskin, kelompok marjinal)

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu metode penelitian kualitatif, yang memfokuskan pada program pemberdayaan masyarakat perkotaan yang ada di Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang . Jumlah informan dalam penelitian ini ialah 10 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, pengamatan dan studi dokumentasi. Sampel ditentukan secara purposive sampling dan data dianalisis secara reduksi data, penyajian data, verifikasi dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kelurahan Lawangirung merupakan salah satu dari 12 kelurahan yang ada di Kecamatan Wenang. Dengan luas kelurahan 25.6 Ha dan luas pemukiman 12.1 Ha dan ketinggian 4 meter dari permukaan laut serta berjarak 0.2 kilometer dari ibukota kecamatan. Itulah sebabnya maka pembuatan dan perbaikan sanitasi, saluran, jalan dan jalan setapak akan menjadi prioritas utama dalam program ini selain penerangan jalan dan jalan setapak (lorong).

PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di Kelurahan Lawangirung telah dimuai sejak tahun 2009 PNPM Mandiri Perkotaan yang ada di Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari PNPM Mandiri Nasional, oleh sebab itu pengelolaan program ini juga

merupakan bagian dari pengelolaan program nasional PNPM Mandiri yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang telah diterbitkan oleh Pokja Pengendali PNPM Mandiri.

Ditingkat kelurahan unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah :

- a) Lurah : Secara umum peran utama kepala kelurahan adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dapat tercapai dengan baik.
- b) Relawan Masyarakat : Kehadiran relawan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai konsekuensi logis dari penerapan pembangunan yang berbasis masyarakat yang membutuhkan penggerak-penggerak dari masyarakat sendiri yang mengabdikan tanpa pamrih, ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Proses pembangunan yang berbasis masyarakat tidak akan terlaksana apabila pelopor-pelopor yang menggerakkan masyarakat tersebut merupakan individu-individu yang bekerja dengan pamrih pribadi. Dengan kata lain perubahan masyarakat sangat ditentukan oleh relawan-relawan yang memiliki moral baik dan mampu menjadi contoh perubahan.
- c) BKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat)
BKM ini bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya.
- d) KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat)
KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan (*common bond*) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dengan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh BKM melalui berbagai dana yang mampu digalang.

Lembaga Keswadayaan Masyarakat di Kelurahan Lawangirung bernama BKM Kawanua. BKM merupakan nama generik atau istilah umum untuk suatu institusi /lembaga masyarakat dengan kedudukan sebagai pimpinan kolektif dari suatu organisasi masyarakat di tingkat kelurahan. BKM bertanggung jawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya.

BKM Kawanua terbentuk melalui pemilihan di tingkat lingkungan untuk memilih utusan-utusan bakal calon BKM dan dilanjutkan di tingkat kelurahan. Setelah pemilihan dilaksanakan, terpilihlah 11 (sebelas) orang anggota BKM. BKM Kawanua dicatatkan di notaris Sianet Winar, SH dengan nomor 260/W/XI/2009 tanggal 07 November 2009. Setelah melewati masa bakti sesuai dengan Anggaran Dasar BKM Kawanua pada bulan Februari 2012 dilakukan Pemilihan Kembali anggota BKM seiring dengan dilaksanakannya review kelembagaan dalam siklus *Review Partisipatif*.

Visi dari PJM Pronangkis Kelurahan Lawangirung adalah “ Tahun 2014 warga miskin di Kelurahan Lawangirung hidup sehat dan memiliki sumber daya manusia yang handal sebagai modal dasar menuju masyarakat sejahtera”.. Sedangkan Misinya adalah meningkatkan SDM masyarakat miskin dengan membuka akses lapangan kerja, membuka akses untuk permodalan, meningkatkan kesadaran masyarakat akan ketertiban/keamanan dan kebersihan lingkungan serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan guna meningkatkan kesehatan masyarakat miskin.

Sejak tahun 2009 pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Lawangirung sampai dengan tahun 2013 telah melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat baik untuk kegiatan di

bidang infrastruktur, sosial dan ekonomi. Pelaksanaan program-program kegiatan yang telah dilakukan dimulai dari sosialisasi awal, perekrutan relawan, pemetaan swadaya, refleksi kemiskinan, pembentukan BKM, penyusunan dokumen Perencanaan Jangka Menengah Program Penanganan Kemiskinan (PJM Pronangkis), pelatihan-pelatihan dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan lapangan.

Kegiatan di bidang fisik lingkungan yang telah dikerjakan di Kelurahan Lawangirung oleh KSM yang ada seperti pembuatan drainase, perbaikan jalan, pembuatan talud dan pembuatan saluran air. Kegiatan dalam bidang sosial berupa pengadaan kursi plastik, pengadaan tenda, beasiswa bagi anak yang kurang mampu, pemberian tambahan gizi bagi para lansia, pengadaan meja makan, taplak dan alat catering, kursus mengemudi, pelatihan pembuatan kue. Sedangkan untuk bidang ekonomi yang telah dilaksanakan berupa pinjaman ekonomi bergulir.

Pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan Kelurahan Lawangirung Kecamatan Wenang dari tahun 2009 s/d tahun 2015 selengkapanya dalam :

Tabel : Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di Kelurahan Lawangirung tahun 2009 s/d 2013

No.	Tahun	Kegiatan	Volume	Lokasi Kegiatan
1.	2009	1. Pembuatan drainase	149 m	Lingk. IV
		2. Pengadaan kursi plastik dan tenda untuk beasiswa, makanan tambahan untuk balita	52 buah dan 2 unit	Lingk. V
2.	2010	1. Pinjaman Ekonomi Bergulir (untuk 5 KSM)	29 orang	Lingk. II,III,IV,V,VI
		2. Pengadaan tenda untuk membiayai gizi lansia	2 unit	Lingk. VI
		3. Pengadaan meja makan, taplak, alat catering	1 unit,1 unit, 30 buah	Lingk. VI
3.	2011	1. Pembuatan jalan rabat beton, talud dan railing tangga	123 m	Lingk. VI
4.	2012	2. Kursus Mengemudi	10 orang	Lingk. V
		1. Perbaikan Jalan	25 m, 3 unit	Lingk. I, II,III,VI
5.	2013	2. Perbaikan Saluran		
		3. Pemasangan railing		
		4. Pemasangan Lampu		
		Pembuatan jalan rabat, pembuatan talud, pembuatan railing, pembuatan saluran air		Lingk. VI

Sumber : BKM Kawanua Kelurahan Lawangirung

PENUTUP

Kesimpulan

Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Lawangirung telah memberikan dampak yang positif baik dalam hal pembangunan infrastruktur baik sarana dan prasarana maupun sosial. Dampak lainnya juga bisa dilihat dari menurunnya jumlah keluarga miskin karena kesejahteraan mereka mulai meningkat. Program-program pemberdayaan masyarakat perkotaan tidak akan berhasil apabila tidak ada partisipasi aktif dari masyarakat. Partisipasi dan keterlibatan

masyarakat Kelurahan Lawangirung dalam pelaksanaan setiap kegiatan dan program pemberdayaan masyarakat perkotaan sangat baik. Hal ini dapat terlihat dari kehadiran di setiap rapat dan pertemuan warga untuk membahas dan mendiskusikan program pemberdayaan masyarakat perkotaan baik di tingkat kelurahan maupun di lingkungan masing-masing. Sebagian masyarakat ada yang membantu baik berupa tenaga, materi seperti peminjaman barang/alat yang dibutuhkan dalam pengerjaan suatu kegiatan, dan penyediaan konsumsi.

Partisipasi masyarakat Kelurahan Lawangirung menghasilkan pembuatan *drainase*, pembuatan jalan rabat beton, talud, pembuatan jalan setapak, *railing* tangga, dan pemasangan lampu jalan. Kegiatan di bidang sosial seperti pengadaan kursi, tenda, perlengkapan sekolah untuk anak kurang mampu, makanan tambahan untuk balita dan kaum lansia, kursus mengemudi, pelatihan pembuatan kue; sedangkan untuk bidang ekonomi berupa pinjaman dana bergulir untuk keluarga miskin di kelurahan.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah : 1) Program pemberdayaan masyarakat perkotaan agar lebih lagi dioptimalkan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan di kelurahan, agar pemahaman mengenai tujuan, manfaat dan mekanisme kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan efektif dan efisien dan tepat sasaran, 2) Perlunya pengetahuan dalam menyusun kegiatan dan koordinasi sektoral yang lebih baik dengan melibatkan partisipasi masyarakat miskin di setiap kegiatan agar program pemberdayaan masyarakat perkotaan tepat sasaran, 3) Hasil dari pemberdayaan masyarakat perkotaan memberikan manfaat, pengurangan beban, peningkatan pendapatan dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, R. 2006. *"Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan.* Graha Ilmu, Yogyakarta.

----- **2010.** *"Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang".* Graha Ilmu, Yogyakarta.

Chambler, R. 1995. *Poverty and Livelihood : Whose Reality Counts,* Discussion Paper 347, Brighton, Institute of Development Studies.

Adi I. R. 2008. *"Intervensi Komunitas : Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan masyarakat".* PT. rajaGrafindo Persada, Jakarta.

Fahrudin, A. 1996. *"Pemberdayaan, Partisipasi dan Penguatan Kapasitas Masyarakat.* Humaniora. Bandung.

Hikmat H. 2010. *"Strategi Pemberdayaan Masyarakat".* Humaniora Utama Press (HUP). Bandung.

Ife, J. 2008. *"Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di era Globalisasi".* Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Kieffer, C.H. 1984. *Citizen Empowerment: A Developmental Perspective, Prevention in Human Service.* Vol. 3. USA.

Miles, B. B. dan A. M. Huberman. 1992. *"Analisa Data Kualitatif.* UI Press Jakarta.

- Ndraha, T. 1999.** *"Pengantar Teori Pembangunan Sumber Daya Manusia"*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Nes, M. dan P. Sugianto., 2008.** *"Modul Dasar Konsultan & Pemda Tema : Pemberdayaan"*. DPU. Jakarta .
- Rahayu, S. L. 2012.** *"Bantuan sosial di Indonesia": Sekarang dan Ke Depan"*, Fokusmedia. Bandung.
- Raharjo, A. 2006.** *"Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan"*. Edisi pertama. Graham Ilmu. Yogyakarta.
- Rappaport, J. 1984** *"Studies In Empowerment : Introduction To The Issue, Preveniton In Human Issue. USA .*
- Sanafiah F. 1990.** *"Penelitian Kualitatif, Dasar-dasar dan Aplikasi"*. Malang.
- Subardi, E. 2012.** *"Bantuan Sosial di Indonesia Sekarang dan Ke Depan. Fokusmedia. Bandung.*
- Sumardjan S, Alfian dan Mely G. Tan. 1984.** *"Kemiskinan Struktural"*. PT. Sangkala Pulsar, Jakarta.
- Soetomo, 2006.** *"Strategi-strategi Pemberdayaan Masyarakat"*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- **2012.** *"Keswadayaan Masyarakat : Manifestasi Kapasitas Masyarakat Untuk Berkembang Secara Mandiri"*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suharto, E. 1997.** *"Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerja Sosial : Spektrum Pemikiran"*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- **2010.** *"Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat"*. PT. Refika Aditama, Bandung.
- Suhartini Rr, A. Halim, Imam Khambali dan Abd. Basyid. 2005.** *"Model-model Pemberdayaan Masyarakat"*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta.
- Sulistiyani, A.T. 2004.** *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan.* Penerbit Gava Media. Yogyakarta.
- Sugiyono, 2012.** *"Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif"*, R & D Alfabeta, Bandung.
- Sumarno A. P. dan T. S. Ismet. 2000.** *"Dasar-dasar Komunikasi Politik"* .Alumnus Press, Bandung.
- Sumodiningrat, G. 2000.** *"Visi dan Misi Pembangunan dengan Basis Pemberdayaan Masyarakat"*, dalam Seminar Pemberdayaan Sosial Ekonomi Masyarakat Menyongsong Indonesia Baru. IDEA, Yogyakarta.
- , **2000** *"Pembedayaan Masyarakat"*. JPS, Jakarta.
- Tjiptoherijanto, P. 2002.** *"Prospek Perekonomian Indonesia dalam Rangka Globalisasi"*. PT. Rineke Cipta, Jakarta.

Usman, S. 1998. *"Memberdayakan Masyarakat"*. Rineka Cipta, Jakarta.

Winarni, T. 1998. *"Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif"*. Aditya Media, Yogyakarta.

Yulius S. 2012. *"Modal Sosial dan Kemiskinan"*. UNS Press, Surakarta.

Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. *Pedoman Teknis Kegiatan Tridaya (Sosial, Ekonomi & Lingkungan), Bersama Membangun Kemandirian*. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan Umum.

Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. *Petunjuk Teknis: Pengembangan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat, Bersama Membangun Kemandirian*. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kementerian Pekerjaan Umum.